

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada *stakeholder* mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jombang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JOMBANG**



HARTONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691002 198903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2 Tugas dan fungsi.....	3
1.3 Isu strategis.....	4
1.4 Cascading.....	4
1.5 Peta Proses Bisnis.....	5
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.....	7
2.1.1 Rencana Strategis.....	7
2.2.2 Rencana Kinerja 2021.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2 Capaian Kinerja Anggaran.....	24
3.3 Tindak Lanjut Evaluasi.....	28
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Upaya-upaya dimasa mendatang.....	33

LAMPIRAN

Peta Proses Bisnis

Form Pendanaan Indikatif pada Renstra

Rencana Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran Kinerja Tahun 2021

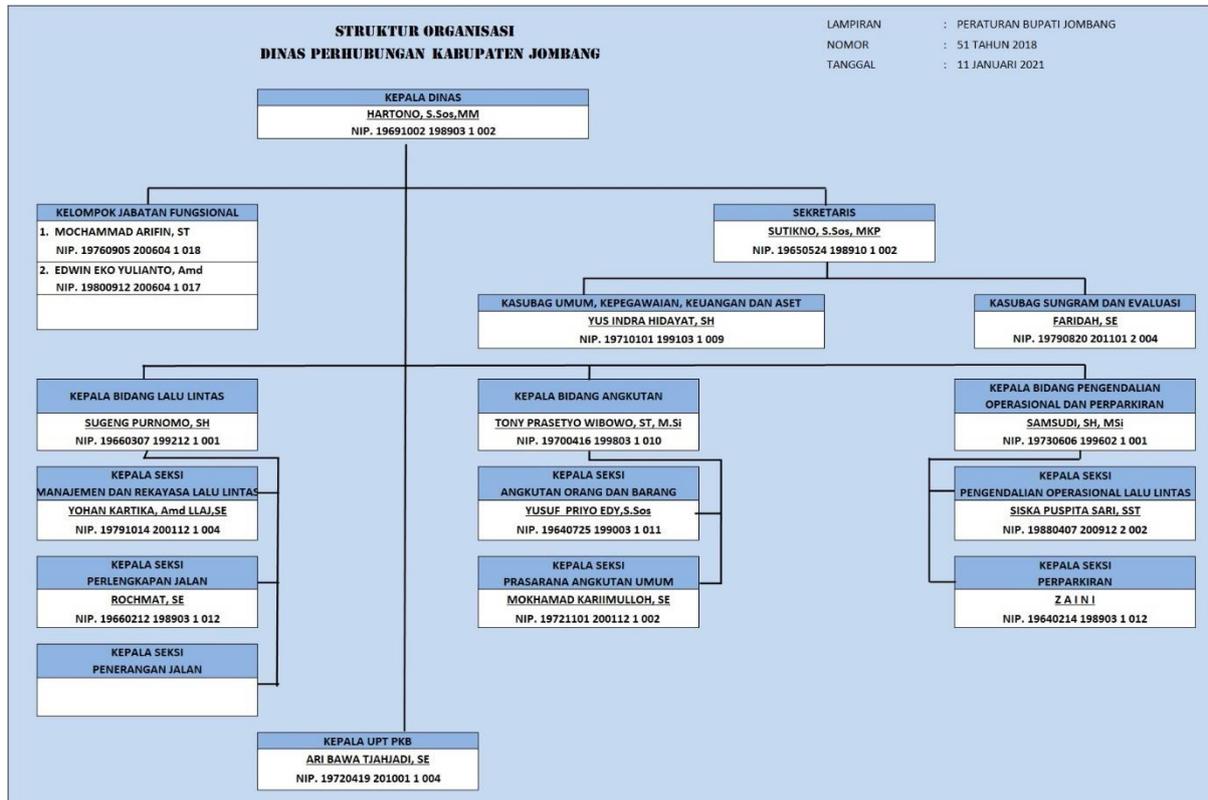
Lampiran Berita acara verifikasi desk Rancangan Akhir Perubahan Renstra 2018-2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, maka susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang



1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang No 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang perhubungan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki satu sekretariat dan 3 (tiga) bidang sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Jombang No 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- a. **Sekretariat.** Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi
- b. **Bidang Lalu Lintas** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas serta analisis dampak lalu lintas dan perlengkapan jalan
- c. **Bidang Angkutan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan orang dan barang, serta prasarana angkutan umum
- d. **Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengendalian operasional lalu lintas dan perparkiran

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mempunyai 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

- a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis di bidang perhubungan yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Masalah penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi
2. Koordinasi antara instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan perhubungan seperti Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepolisian
3. Masalah pelayanan perparkiran yang tertib dan aman
4. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama dan ketiga dari RPJMD Kabupaten Jombang yaitu

1. Misi pertama adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Good Government;

2. Dan misi ketiga yaitu meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri dengan indikator tujuan Indeks GINI.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mendukung sasaran RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi
2. Dan meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk daya saing dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Infrastruktur.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang adalah

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya infrastruktur dan ketertiban lalu lintas untuk daya saing dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Layanan Transportasi.

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi (1) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, (2) Meningkatnya infrastruktur lalu lintas dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik, (3) meningkatnya keselamatan berlalu lintas dengan indikator penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Gambar 2. Keterkaitan RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2018-2023

KAB	VISI	:	BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
	MISI	:	1 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL
	MISI	:	3 MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS KERAKYATAN POTENSI UNGGULAN LOKAL DAN INDUSTRI
	TUJUAN KAB	:	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL INOVATIF TRANSPARAN DAN EFEKTIF SERTA PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
		:	MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN
	INDIKATOR	:	INDEKS GOOD GOVERNMENT
		:	INDEKS GINI
	SASARAN KAB	:	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA BIROKRASI
		:	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PENDUKUNG DAYA SAING
OPD	INDIKATOR	:	INDEKS REFORMASI BIROKRASI
		:	INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
	TUJUAN OPD	:	1 MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA BIROKRASI
		:	2 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN LALU LINTAS UNTUK DAYA SAING
	INDIKATOR	:	1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI
		:	2 INDEKS KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI
	SASARAN OPD	:	1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
		:	2 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR LALU LINTAS
		:	3 MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALU LINTAS
INDIKATOR	:	1 NILAI EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	
	:	2 PERSENTASE PEMENUHAN FASILITAS PERHUBUNGAN YANG BERFUNGSI BAIK	
	:	3 PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS	

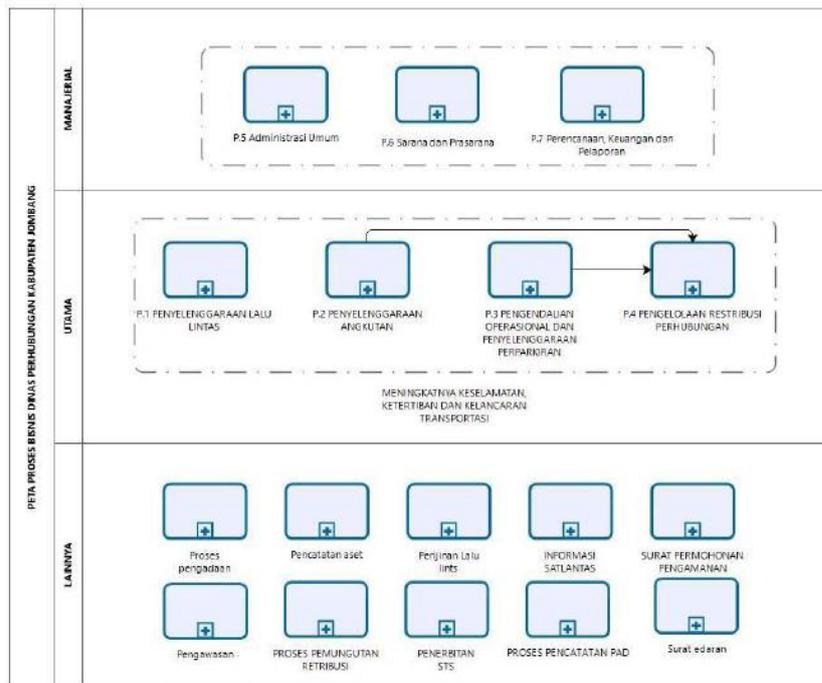
1.5 Peta Proses Bisnis

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang



1 PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG



Powered by
bizagi
Estate

Untuk peta proses bisnis Dinas Perhubungan yang lengkap sebagaimana terlampir.

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Bedasarkan surat dari Inspektorat Nomor X.700/351/415.15/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2020 s/d Semester I Tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun tersebut adalah 80,26 dengan kategori A (memuaskan) dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilakukan secara periode, namun atas rekomendasi dari pemantauan rencana aksi belum ditunjukkan dalam bentuk langkah-langkah nyata (tidak didapat bukti tindak lanjut atas rekomendasi)
2. Informasi capaian kinerja didasarkan pada laporan kinerja instansi tahun 2020, dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian kinerja atas sasaran tahun 2020 adalah sebesar 101% dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas layanan transportasi	68,49	69,63	101%

Sedangkan untuk perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena terdapat perubahan indikator kinerja.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja OPD, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, yaitu;

1. Rekomendasi atas evaluasi pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja agar ditunjukkan dalam bentuk langkah-langkah nyata (dengan menyajikan bukti tindak lanjut atas rekomendasi)
2. Membuat rencana aksi yang strategis dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan/sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang ditetapkan dengan memperhatikan perubahan kondisi/kebijakan layanan transportasi dan pada perencanaan kinerja berikutnya agar memperhatikan rekomendasi/saran tindaklanjut yang disajikan dalam LKJIP tahun sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja.

Atas kondisi tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sesuai dengan rekomendasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan infrastruktur pendukung daya saing dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan pada Kabupaten Jombang. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1 Rencana strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis

TUJUAN:

1. **MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA BIROKRASI**
2. **MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KETERTIBAN LALU LINTAS UNTUK DAYA SAING**

Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, maka sasaran strategis yang dicapai adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya infrastruktur lalu lintas
3. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
2. Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik
3. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
 - 1.6.2 Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
 - 1.6.4 Pemeliharaan/Rehanilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkuTan Jalan (LLAJ)

- 2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
 - 2.1.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 2.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - 2.2.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- 2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.3.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.1 Penyediaan Bkti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 2.4.2 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan bermotor
 - 2.4.3 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - 2.4.4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten.Kota
 - 2.5.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 2.6 Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.6.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- 2.7 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

2.7.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemanfaatan unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

2.1.2 Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2021. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021. Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana kinerja 2021.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang Didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas	1. Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan Yang berfungsi baik	63,1%
2	Meningkatnya Keselamatan berlalu lintas	2. Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2%
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	3. Nilai Evaluasi SAKIP	80,38

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	25	50	75	100	Rp. 31.943.350.256,00
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Presentase fasilitas perhubungan yang dibangun	2,2%	10	75	80	100	Rp. 7.613.092,00
			Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas	5%	25	50	75	100	
	JUMLAH								Rp. 39.557.331.348,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Adapun pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang hingga Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja nilai evaluasi implementasi SAKIP. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerjanya tersebut, setiap tahun dilakukan evaluasi atas penerapan SAKIP oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada Seluruh Perangkat Daerah. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

SS 1		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah							
IKU 1		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah							
Realisasi			Tahun 2021			Peningkatan Tahun 2020-2021	Renstra Tahun 2018-2023		
2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian		Target 2024	Realisasi s/d Th 2021	Tingkat Kemajuan
70,03	70,61	80,28	80,38	80,26	99,85%	-0,024%	80,88	80,26	99,23%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan tahunan, pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mendapatkan nilai sebesar 80,26 atau turun sebesar 0,024% dari nilai SAKIP tahun 2020.

Upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain penyalarsan sistem perencanaan; penganggaran dan informasi kinerja; sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja; partisipasi dan komitmen seluruh level pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja; peningkatan budaya kinerja; pengelolaan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah; pengintegrasian sistem anggaran.

Nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 diperoleh dari komponen sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Komponen Pembentuk

No	Komponen Pembentuk	Target	Tahun	
			2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,60	25,88
2	Pengukuran Kinerja	25,00	20,94	20,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,93	12,95
4	Evaluasi Kinerja	10,00	7,56	8,18
5	Pencapaian Kinerja	20,00	13,25	13,25
	Nilai Evaluasi Akhir	100,00	80,28	80,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Sumber data: Inspektorat Kab. Jombang

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja masih perlu peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada lima komponen pembentuk.

Tabel 4. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	31.943.350.256	28.460.140.511	89,10%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Upaya pencapaian sasaran strategis didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.943.350.256 dan terealisasi sebesar Rp. 28.460.140.511 atau 89,10%

Tabel 5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,38	80,26	99,85%	31.943.350.256	28.460.140.511	89,10%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	31.943.350.256	28.460.140.511	89,10%
---	---	------	------	------	----------------	----------------	--------

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Tabel 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja Th 2021	%Penyerapan Anggaran Th 2021	%Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,85%	89,10%	10,75%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,85 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,10% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 10,75%.

Tabel 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja Th 2021	% SDM yang tersedia /SDM yang seharusnya ada	%Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	99,85%	74,07%	25,77%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Pengukuran efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan persentase sumber daya manusia yang tersedia sibagijumlah SDM yang seharusnya ada dengan capaian kinerja sebesar 99,85 dan persentase sumber daya yang ada sebesar 74,07% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya manusia sebesar 25,77%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja dari program-program pendukung sasaran. Secara keseluruhan capaian kinerja program-program pendukung sasaran telah mencapai

hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur terealisasi sesuai target sebesar 100%. Program ini berisi kegiatan dan sub kegiatan umum dan sekretariat. Hampir semua kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan 100%, dengan total penyerapan mencapai 89,10% dari total anggaran. Terdapat efisiensi yang besar dari sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang mempunyai silpa Rp. 2.420.244.569, serta sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai silpa sebesar Rp. 900.300.596,-. Kedepannya akan dilakukan perhitungan yang lebih cermat untuk meminimalisir besarnya silpa.

SASARAN STRATEGIS 2 :

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR LALU LINTAS

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik, yang didapat dari jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik dibagi jumlah total fasilitas yang ada dikali 100%.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik

SS 2		Meningkatnya Infrastruktur Lalu Lintas								
IKU 2		Persentase Fasilitas Perhubungan yang Berfungsi Baik								
Realisasi			Tahun 2021			Peningkatan Tahun 2020-2021	Renstra Tahun 2018-2023			
2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian		Target 2023	Realisasi s/d Th 2021	Tingkat Kemajuan	
N/A	N/A	N/A	63,1%	67,34%	106,7%	N/A	74,89%	67,34	89,92%	

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Indikator Persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik merupakan indikator baru dalam Renstra Perubahan tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Permendagri no 90 Tahun 2019. Capaian indikator tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Layanan Transportasi

SS 2		Meningkatnya Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi								
IKU 2		Indeks Kualitas Layanan Transportasi								
Realisasi		Tahun 2020			Peningkatan Tahun 2019-2020	Renstra Tahun 2018-2023				
2018	2019	Target	Realisasi	Capaian		Target 2023	Realisasi s/d Th 2020	Tingkat Kemajuan		
63,25	66,9	67,28	69,63	103,5%	104%	72,13	69,63	96,53%		

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Terdapat perbedaan sasaran pada tahun 2020 dan 2021 sesuai mapping Permendagri no 90 tahun 2019 yang dapat dilihat dari lampiran berita acara Verifikasi desk rancangan akhir Perubahan Renstra sebagaimana terlampir.

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat dilihat bahwa indikator presentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik terrealisasi sebesar 67,34%, angka ini didapat dari jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik dibagi jumlah total fasilitas yang ada dikai 100%. Perhitungan tersebut sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 10. Perhitungan indikator persentase fasilitas perhubungan yang berfungsi baik
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Jenis Fasilitas perhubungan	Kondisi awal		Jumlah	Bangun	Pelihara
		baik	Perlu pemeliharaan			
1	Trafic Light	33	1	34	5	3
2	Warning Light	108	8	116	1	4
3	Guardrail	14	0	14	2	
4	rambu	2113	413	2526	102	4
5	Lampu PJU	2305	2809	5114	70	601
6	Halte	16		16		
7	Palang Pintu KA	2	0	2	2	1
8	Fasilitas terminal	5	1	6		2
		4596	3232	7828	182	616
Jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik = 4596+182+616 = 5394						
Jumlah total fasilitas yang ada = 7828+182 = 8010						
Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik = $\frac{\text{jumlah fasilitas perhubungan yang berfungsi baik}}{\text{jumlah total fasilitas yang ada}} \times 100\% = \frac{5394}{8010} \times 100\% = 67,34\%$						

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan standar nasional sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2013

N o	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulas i	Realisas i	Target Standar Pelayana	Tingkat kemajua n	Keterangan
--------	----------------------	----------------------	---------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	------------

					n Minimal		
1	Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	(Jumlah fasilitas yang berfungsi baik/ jumlah total fasilitas yang ada) x100%	67,34%	60%	7,34%	Perbedaan formulasi perhitungan menyebabkan perbedaan nilai kinerja. Menurut Permenhub no PM 2 Tahun 2013 adalah jumlah perlengkapan jalan terpasang pada jalan kabupaten/kota dibagi total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten/kota x 100%. Namun jika ditarik dengan formulasi ini, sebenarnya bisa dihitung tingkat kemajuannya. Total kebutuhan perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah 29.870 sedangkan yang sudah terbangun adalah 8.010, sehingga tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah $=8.010/29.870 \times 100\% = 26,81\%$

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan kinerja dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2013. Kinerja yang bisa diperbandingkan adalah pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik, namun tidak serta merta nilai ini dapat disandingkan dengan nilai standart pelayanan minimal, karena terdapat perbedaan formulasi perhitungan di keduanya. Perbedaan tersebut adalah di persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik mempunyai formulasi (*Jumlah fasilitas yang berfungsi baik/ jumlah total fasilitas yang ada*) $\times 100\%$ sedangkan penentuan standart pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 2 Tahun 2013 adalah (*jumlah perlengkapan jalan terpasang pada jalan kabupaten/kota dibagi total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten/kota*) $\times 100\%$. Namun jika ditarik dengan formulasi ini, sebenarnya bisa dihitung tingkat kemajuannya. Total kebutuhan perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah 29.870 sedangkan yang sudah terbangun adalah 8.010, sehingga tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Jombang adalah $= 8.010 / 29.870 \times 100\% = 26,81\%$. Angka ini masih jauh dari standart pelayanan minimal dari permenhub PM 2 Tahun 2013 ini. Ke depannya dengan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Perhubungan akan memenuhi pemenuhan perlengkapan jalan tersebut.

Tabel 12 Alokasi Per sasaran pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	4.263.754.092	4.031.851.739	94,56%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya infrastruktur lalu lintas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.263.754.092 dengan realisasi sebesar Rp. 4.031.851.739 atau sebesar 94,56%

Tabel 13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang	63,1%	67,34	106,72%	4.263.754.092	4.031.851.739	94,56%

	berfungsi baik						
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase fasilitas perhubungan yang dibangun	2,2%	2,3%	104%	4.263.754.092	4.031.851.739	94,56%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Persentase fasilitas perhubungan yang dibangun dan persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dengan alokasi anggaran Rp. 4.263.754.092. Untuk besaran capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persentase fasilitas perhubungan yang dibangun

Formula dari persentase fasilitas perhubungan yang dibangun adalah :

$\frac{\text{Jumlah fasilitas perhubungan yang dibangun}}{\text{Jumlah fasilitas perhubungan yang ada}} \times 100\%$

Jumlah fasilitas perhubungan yang ada

Jumlah fasilitas perhubungan yang dibangun tahun 2021 adalah sebanyak 182 unit yang terdiri dari:

Trafic light	:	5	unit
Warning light	:	1	unit
guardrail	:	2	unit
Rambu	:	102	unit
Lampu PJU	:	70	unit
Palang Pintu KA	:	2	unit
Total	:	182	unit

Sedangkan jumlah fasilitas perhubungan yang ada adalah sebanyak 8.010 unit

Jadi persentase fasilitas perhubungan yang dibangun adalah $182/8.010 \times 100\% = 2,3\%$

Tabel 14. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja Th 2021	%Penyerapan Anggaran Th 2021	%Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	106,72%	94,56%	12,16%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,75 % dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,56% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 12,16%.

Tabel 15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja Th 2021	% SDM yang tersedia /SDM yang seharusnya ada	%Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya infrastruktur Lalu Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	106,72%	29,55%	106.42%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Pengukuran efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan persentase sumber daya manusia yang tersedia sibagijumlah SDM yang seharusnya ada dengan capaian kinerja sebesar 106,72 dan persentase sumber daya yang ada sebesar 29,55% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya manusia sebesar 106,42%

SASARAN STRATEGIS 3 :

MENINGKATNYA KESELEMATAN LALU LINTAS

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan perhitungan jumlah kecelakaan pada tahun N dikurangi jumlah kecelakaan pada tahun N-1 dibagi jumlah kecelakaan pada tahun N-1.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

SS 2		Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas							
IKU 2		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas							
Realisasi			Tahun 2021			Peningkatan Tahun 2020-2021	Renstra Tahun 2018-2023		
2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian		Target 2023	Realisasi s/d Th 2021	Tingkat Kemajuan
N/A	N/A	N/A	2%	7,36%	368%	N/A	4%	7,36	184%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Indikator Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan indikator baru dalam Renstra Perubahan tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan pada Permendagri no 90 Tahun 2019.

Untuk indikator persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di dapat dari data laka lintas SATLANTAS Jombang. Data kejadian kecelakaan yang diambil adalah data yang berhubungan dengan tupoksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Data tersebut adalah data terkait kendaraan yang terlibat laka, yaitu kendaraan berpenumpang, kendaraan barang, bus dan kendaraan khusus, serta kejadian laka di perlintasan kereta api.

Untuk perhitungan persentase penurunan kecelakaan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 17. Perhitungan indikator persentase penurunan angka kecelakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021

No	Uraian	2020	2021
1	Jumlah laka kendaraan berpenumpang, barang, bus, dan kendaraan khusus	95	81
2	Jumlah laka di perlintasan sebidang	0	7
	Jumlah	95	88
	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas $= \frac{\text{Jumlah kecelakaan tahun 2021} - \text{jumlah kecelakaan tahun 2020}}{\text{Jumlah kecelakaan tahun 2020}} \times -100\% = \frac{88-95}{96} \times -100\% = 7,36\%$		
		Jumlah kecelakaan tahun 2020	96

Sumber data: Satlantas Kab. Jombang

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan standar nasional

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi	Realisasi Nasional	Tingkat kemajuan	Keterangan
1	Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	$(\text{Jumlah kecelakaan pada tahun } n \text{ dikurangi jumlah kecelakaan } n-1 \text{ dibagi jumlah kecelakaan pada tahun } n-1) \times 100\%$	7,36%	3,62%	3,74%	Data dari Kementerian Perhubungan yang mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas darat tahun 2021 sebanyak 103.645 kasus atau naik sebesar 3,62% dibanding

							tahun sebelumnya sebanyak 100.028
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang dan Kementerian Perhubungan

Tabel 19 Alokasi Per sasaran pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	3.350.227.000	3.173.470.452	94,72%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya infrastruktur lalu lintas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.350.227.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.173.470.452 atau sebesar 94,72%

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2%	7,36%	368%	3.350.227.000	3.173.470.452	94,72%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	5%	5%	100%	3.350.227.000	3.173.470.452	94,72%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagaimana pada tabel.

Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas di dapat dari perhitungan sebagai berikut:

Formula dari persentase penurunan pelanggaran lalu lintas adalah

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N} - \text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}}{\text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}} \times 100\%$$

jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1

Tabel 21. Jumlah pelanggaran pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	2020	2021				
		Tribulan I	Tribulan II	Tribulan III	Tribulan IV	Total
jumlah pelanggaran ODOL (Over Load Over Dimension)	187	37	31	35	59	162
Jumlah pelanggaran parkir	3935	993	858	794	1109	3754
	4122	1030	889	829	1168	3916

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase penurunan pelanggaran lalu lintas sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N} - \text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}}{\text{jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1}} \times 100\%$$

jumlah pelanggaran lalu lintas tahun N-1

$$\frac{3.916 - 4.122}{4.122} \times 100\% = 5\%$$

4.122

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja Th 2021	%Penyerapan Anggaran Th 2021	%Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	368%	94,72%	273,28%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas tampak bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatkan infrastruktur Lalu Lintas dengan persentase capaian kinerja sebesar 368% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,72% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 273,28%

Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	%Capaian Kinerja Th 2021	% SDM yang tersedia /SDM yang seharusnya ada	%Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Keselamatan Berjalan Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	368%	32,05%	335,95%

Sumber data: Dinas Perhubungan Kab. Jombang

Pengukuran efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan persentase sumber daya manusia yang tersedia sibijumlah SDM yang seharusnya ada dengan capaian kinerja sebesar 368% dan persentase sumber daya yang ada sebesar 32,05% telah mengefisiensi penggunaan sumber daya manusia sebesar 335,95%

3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD tahun 2021. Adapun jumlah APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah sebesar Rp. 39.557.331.348,- dan terealisasi sebesar Rp 35.671.164.985,- atau mencapai 90,17 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24 Jumlah Anggaran dan Realisasi APBD tahun 2021

No	Program/Keg/Sub Keg	Alokasi biaya		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	31.943.350.256	28.465.842.794	89,10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.763.750	28.683.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5211250	5.211.100	100
	Koordinasi dan Penyusunan	12767500	12.767.500	100

	Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10785000	10.785.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.017.772.713	8.559.955.252	75
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9846402963	7.431.079.742	73
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1156381000	1.114.007.760	96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14988750	14.867.750	99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104000000	103.840.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104000000	103.840.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1105426333	1.053.860.114	88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.224.933	39.224.795	88
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.893.000	346.731.930	71
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.920.000	98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.910.000	357.848.888	93
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	193.059.400	185.384.450	93
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.916.000	13.860.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.423.000	105.890.939	100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18584805080	17.684.137.523	95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.449.445.080	17.549.925.419	95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.360.000	134.212.104	99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1102582380	1.035.366.305	61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.038.000	27.131.000	65
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587046880	541.126.934	92
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	370500000	364.141.471	98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.997.500	102.966.900	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.613.981.092	7.205.322.191	95
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.137.898.092	3.908.739.957	94
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	900.000	900.000	100
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.457.355.500	2.250.493.534	96

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	9.175.500	9.155.500	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.670.467.092	1.548.190.923	93
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	125856000	123.111.784	98
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2349612200	2.188.618.325	93
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasikan secara elektronik	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2349612200	2.188.618.325	93
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	711494300	696.955.325	98
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	286.245.200	284.590.175	99
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.017.600	34.926.300	100
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	277.401.500	268.633.350	97
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	112.830.000	108.805.500	96
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	75.620.000	74.737.300	99
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	55.100.000	54.287.300	99
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	20.520.000	20.450.000	100
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.040.000	4.889.500	97

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	5.040.000	4.889.500	97
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	208.460.500	208.270.000	100
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	208.460.500	208.270.000	100
	Jumlah	39.557.331.348	35.671.164.985	90,17

3.3 Tindak Lanjut Hasil evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja, selama tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi tim evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Telah dilakukan revisi pada dokumen kertas kerja penetapan target dengan melampirkan perhitungan penetapan target

The following tables are extracted from the screenshots:

Table 1: Proyeksi fasilitas perhubungan tahun 2021

No	Jenis Perengkapan Jalan	Baik	Perlu perbaikan	Kondisi Rusak	Perlu diganti	Hilang	Jumlah yang dipelihara
1	Traffic light	33	0	0	1	0	34
2	Warning Light	108	3	0	4	1	116
3	Guardrail	14	0	0	0	0	14
4	Bambu	2116	163	57	33	137	2.056
5	Pipa	2760	2536				5.296
6	Salib	38					38
7	fasilitas terminal	5	1				6
Jumlah		5054	2709	57	38	138	8.010
Jumlah fasilitas yang dibangun			197				197
Jumlah total fasilitas yang ada		8.010					8.010
Rasio fasilitas yang dibangun			2%				2%

Table 2: Perhitungan persentase angka keceakaan lalu lintas

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
angka keceakaan	1186	1116	1074	1355	945			
target penurunan		6	4	-26	30	19	28	36
persentase penurunan angka keceakaan lalu lintas						2%	3%	4%

Table 3: Perhitungan persentase penurunan pelanggaran lalu lintas

	2020	2021	2022	2023
jumlah pelanggaran	4122			
target penurunan		206	235	258
persentase penurunan pelanggaran lalu lintas		5%	6%	7%

- Telah dilakukan penyesuaian dalam dokumen renstra dan renja terkait kesamaan angka-angka target yang sesuai dengan target pada kertas kerja penetapan target Dokumen Renja

No	Indikator	Unit	2021	2022	2023
2.15.02.01	PROG RAM PRINC LINDR JIJAB di Partu LINTA 7 yang di bangun di JIJAB (ILAI)	Rak, wahana, Lemak, bahan, perlengkapan, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.02	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.03	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.04	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.05	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.06	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.07	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.08	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.09	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.10	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124

Dokumen Renstra Bab 4

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan ya Infrastruktur & Lalu Lintas	Perencanaan Pemanfaatan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	63,10%	68,82%	74,89%		
2	Meningkatkan ya Keselamatan & Berkelanjutan	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas		2%	3%	4%	

Dok Renstra Bab 6

No	Indikator	Unit	2021	2022	2023
2.15.02.01	PROG RAM PRINC LINDR JIJAB di Partu LINTA 7 yang di bangun di JIJAB (ILAI)	Rak, wahana, Lemak, bahan, perlengkapan, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.02	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.03	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.04	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.05	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.06	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.07	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.08	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124
2.15.02.09	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	4.084.481,771	15.761.044.880	15.761.044.880
2.15.02.10	Revisi Perencanaan Salur & Salur Ekstensi Baru	Revisi, Perencanaan, Salur, dan lain-lain	2.274.781.141	18.971.128.124	18.971.128.124

Dok Renstra Bab 7

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya daya dukung infrastruktur untuk layanan transportasi	Indeks Kualitas Infrastruktur Lintas Lintas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Lintas Lintas	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik			63,10%	68,82%	74,89%	78,95%
		Meningkatnya Keselamatan Berlintas Lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu			2%	3%	4%	4%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Penyelenggaraan Lintas Lintas	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang dibangun	Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang dibangun		2%	3,9%	5,9%	5,9%	
		Persentase penurunan		5%	6%	7%	7%	

3. Telah dilakukan penyesuaian pada dokumen RKT terkait pengelompokan kegiatan dan sub kegiatan yang linier dengan sasaran program

SK RKT 2021, rev - Word

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2021	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2021	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2021		NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	2021
								OUTPUT	OUT PUT			
1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lintas Lintas	1. Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	63,10%	1. PROGRAM PENYELANGGARAN LINTAS LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan yang dibangun	2%	1. Penyediaan Peringgapan Jalan di Jalan Kabupaten/Sota	1. Jumlah Peringgapan dan pemeliharaan peringgapan jalan dan pemeliharaan pemenuhan jalan	1) 415 unit 2) 5 unit	1. Jumlah jenis fasilitas prasarana jalan yang dibangun	Jumlah balok yang dibangun	3 unit balok	
									2. Penyediaan Peringgapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peringgapan Jalan Yang Dibancakan	4 Unit	
									3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah balok yang dipelihara	2 Unit	
									4. Rehabilitasi dan Peringgapan	Jumlah Peringgapan	411 Unit	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantu di bidang perhubungan, yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan dibidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data diatas, maka secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, dengan persentase capaian kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 191,52%. Persentase capaian kinerja ini di dapat dari:

1. Capaian indikator persentase pemenuhan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik sebesar 106,72%
2. Capaian indikator persentase penurunan angka kecelakaan alu lintas sebesar 368%
3. Capaian indikator nilai evaluasi SAKIP sebesar 99,85%

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran. Dinas Perhubungan telah berupaya mewujudkan sasaran kerjanya yaitu meningkatnya infrastruktur lalu lintas, meningkatnya keselamatan berlalu lintas, dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan membangun dan memelihara fasilitas perhubungan seperti trafic light, warning light, guardrail, rambu, lampu PJU, halte, palang pintu kereta api, dan fasilitas terminal. Serta melakukan operasi penertiban, dan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas.

Dengan keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang seperti berikut yaitu :

1. Kurangnya SDM yang mempunyai latar pendidikan teknis perhubungan;
2. Kekuatan anggaran yang terbatas dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan menyebabkan masih ada usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan belum terakomodir;
3. Masih tingginya pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum;
4. Masih adanya penerangan jalan yang mengalami gangguan belum terdeteksi oleh petugas Dishub, yang menyebabkan belum optimalnya fungsi penerangan jalan;

5. Vandalisme terhadap sarana dan prasarana lalu lintas masih sering terjadi;
6. Pemilik kendaraan bermotor masih abai dalam mengujikan kendaraannya;
7. Banyaknya kendaraan overload over dimension yang melintas di jalan, namun di saat dilakukan operasi penertiban, banyak pelanggar yang tidak terjaring operasi;
8. Pelanggaran parkir di kawasan tertib lalu lintas masih banyak, ketika pelanggar tersebut diingatkan, seringkali mereka tidak kooperatif.
9. Masih terdapatnya anggaran belanja gaji yang tidak terserap, menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran di Dinas Perhubungan.

Untuk kedepannya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang akan terus meningkatkan kinerja dalam mencapai visi dan misi dalam Renstra maupun dalam RPJMD. Dengan keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi tidak membuat Dinas Perhubungan menjadi kehilangan komitmennya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat kabupaten Jombang.

4.2 Upaya-upaya dimasa mendatang

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Perhubungan agar mencapai hasil yang maksimal maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan MOU dengan STTD Perhubungan Darat dengan pola pembibitan untuk lima tahun ke depan;
2. Menyusun skala prioritas di titik-titik lokasi yang membutuhkan pembangunan fasilitas perhubungan, dan jika memungkinkan dengan menambah pembangunan pada perubahan renja tahun berjalan;
3. Melaksanakan meterisasi pada Idpel-Idpel yang masih menggunakan sistem abonemen;
4. Membentuk tim pengaduan masyarakat untuk menampung laporan-laporan pengaduan dari masyarakat melalui media-media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, baik melalui Instagram, Whatsapp, Facebook. Laporan yang masuk segera ditindaklanjuti oleh tim teknis yang membidangi. Selain itu dengan merintis teknologi smartlamp untuk memudahkan memonitoring penerangan jalan apabila ada kerusakan atau gangguan;
5. Melaksanakan sosialisasi melalui forum LLAJ untuk meminimalisir vandalisme terhadap fasilitas perhubungan;

6. SMS Gateway untuk mengingatkan pemilik kendaraan untuk mengujikendaraannya, selain itu dilakukan juga pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya;
7. Menambah frekuensi operasi dan lokasi penertiban lalu lintas yang bekerja sama dengan instansi terkait;
8. Telah dilakukan penyusunan perda lalu lintas dengan pihak terkait sebagai dasar hukum bagi Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggar lalu lintas;
9. Perhitungan belanja gaji yang cermat dilakukan pada penganggaran tahun berikutnya agar penyerapan anggaran lebih optimal.

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dibuat sebagai wujud tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JOMBANG



HARTONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002